
KONSEP PEMIKIRAN MENGENAI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

Oleh

**Oktri Pamungkas¹⁾, M. Yusuf Noor Khozain²⁾, Irva Rani Zulaikha³⁾,
Miftahul Hilmy Putra⁴⁾, Farid Setiawan⁵⁾**

^{1,2,3,4,5}Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Email: oktri1800031170@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Kebijakan dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang tentu berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Kebijakan tersebut haruslah tepat sasaran sehingga dapat secara efektif dan maksimal dalam implementasinya. Dalam penentuan kebijakan tersebut, analisis kebijakan pendidikan berperan dalam menentukan arah dan memberikan petunjuk bagi para pembuat kebijakan agar kebijakan pendidikan yang dicipitakan membawa perubahan baik terhadap kualitas dan mutu pendidikan. Maka dari hal tersebutlah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait konsep analisis kebijakan pendidikan berupa pengertiannya, urgensi, karakteristik, fungsi dan metodologi dalam analisis kebijakan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode *library research* yang hasil dari penelitian ini adalah pemaparan materi terkait konsep analisis kebijakan pendidikan dari menganalisis dan menyatukan berbagai sumber referensi terkait.

Kata Kunci: Analisis, Kebijakan & Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek penting dalam upaya mensejahterakan suatu bangsa. Apabila pelaksanaan pendidikan di suatu negara tersebut baik, maka pastilah negara tersebut menjadi negara yang maju. Bagi seluruh warga negara Indonesia, pendidikan merupakan hak mereka yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara Indonesia dengan kualitas yang baik serta sesuai dengan bakat dan minat mereka tanpa memantang status sosial, budaya, gender, ras, suku, jabatan dan agama. Pendidikan yang diberikan dan dijamin oleh bangsa Indonesia tentu akan memberikan solusi dari berbagai permasalahan demi mencapai tujuan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya (Fakuroji, 2017).

Berkaitan dengan itu, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dengan prioritas utama pembangunan di bidang pendidikan, baik pada tingkat pusat, provinsi hingga ke daerah-daerah dengan melakukan reformasi pada sektor pendidikan. Landasan utama diambilnya suatu kebijakan adalah hasil

pertimbangan akal yang rasional dari tinjauan seluruh aspek yang mempengaruhi kebijakan tersebut dan tujuan utama yang akan dicapai (Tilaar & Dwijowijoto, 2008).

Untuk mendukung kebijakan pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia telah menyediakan anggaran pendidikan yang mencukupi, melengkapi fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang keberhasilan mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki kompetensi unggul sehingga mampu mewujudkan pembangunan nasional yang optimal dan meningkatkan kinerja yang berdaya saing tinggi di tingkat Internasional (Hastuti & Soehartono, 2018). Dari kebijakan tersebut diharapkan berbagai sumber daya yang ada di Indonesia baik sumber daya manusia dan sumber daya alam haruslah dapat dieksplorasi dengan maksimal.

Dengan demikian, tentunya peranan kebijakan pendidikan dalam menentukan arah serta jalur proses pendidikan di suatu negara

sangatlah penting. Keputusan yang diambil dalam menentukan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan, tentu sangatlah berdampak pada kualitas dari tingkat satuan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang diambil merupakan perubahan dari aspek pendidikan sebelumnya, yaitu perbaikan dalam tujuan, rencana, program-program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menjadi pedoman ketika melakukan kegiatan atau mengambil keputusan (Danhas, 2021).

Tuntutan langkah yang sangat berpengaruh dalam memacu terciptanya pendidikan yang berkualitas serta relevan dengan berbagai keadaan dan kebutuhan bangsa adalah upaya dalam peningkatan kemampuan terhadap analisis kebijakan pendidikan. Para aktor analisis kebijakan pendidikan tentu bukan hanya dituntut hanya menguasai isu-isu pada dunia pendidikan tetapi juga harus mampu menganalisis kebijakan pendidikan yang yang diterapkan dengan baik sehingga mampu memberikan solusi terkait berbagai celah yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan yang diterapkan. Selain itu, analisis kebijakan ini menjadi hal penting karena analisis kebijakan pendidikan berguna untuk menentukan arah serta memberikan petunjuk kepada penyelenggara pendidikan di negara (Gunawan, 1986).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan metode library research yaitu metode yang mengumpulkan sumber-sumber pustaka dan menyatukannya menjadi satu bagian. Langkah dalam metode ini yaitu membaca sumber data (referensi), menghayati serta memahami pembahasan materi, kemudian mencatat hasil tersebut secara singkat, pengumpulan sumber ini biasanya menggunakan berbagai macam referensi literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan referensi lainnya.

Sumber data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah sumber

literatur, baik berupa jurnal atau buku yang tentu berkaitan dengan fokus penelitian kami berupa konsep analisis kebijakan pendidikan melalui penelusuran referensi secara manual atau digital. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode isi (content analisis) dan dilakukan proses pemilihan, perbandingan, penggabungan, pemilihan berbagai makna, hingga ditemukan makna dan materi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan merupakan kegiatan yang menghasilkan informasi kependidikan, menggunakan berbagai data sebagai salah satu masukan terhadap perumusan alternatif kebijakan pada pelaksanaan keputusan yang bersifat politis guna memecahkan masalah kependidikan. Tentunya analisis kebijakan pendidikan tidak semata-mata menganalisis informasi dan data pendidikan, tetapi juga memperhatikan segala aspek yang menyangkut proses pembuatan kebijakan, mulai dari analisis masalah, penyatuan informasi, penentuan alternatif, hingga penyampaian alternatif tersebut kepada para pembuat keputusan terkait pendidikan. Rumusan alternatif kebijakan pendidikan dihasilkan dari pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan tidak secara langsung atau dengan sendirinya dijadikan kebijakan. Rumusan kebijakan, apabila sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang berlaku, maka alternatif kebijakan dapat berubah menjadi kebijakan (Bakry, 2010). Jadi prosedur menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses yang rasional. Sedangkan proses terbentuknya kebijakan menjadi bagian dari proses politik (bargaining position) para pihak yang memiliki kewenangan. Hal serupa juga dijelaskan Suyahman (2016) bahwa analisis kebijakan pendidikan merupakan prosedur yang menghasilkan informasi keadaan pendidikan, menggunakan himpunan data sebagai masukan terhadap perumusan alternatif

kebijakan pengambilan keputusan yang bersifat politis sebagai upaya memecahkan masalah pendidikan.

Dilain sisi, bisa dipahami bahwa terdapat banyak pihak menyakini pendidikan itu harus terbebas dari politik, namun sejatinya tidak ada satupun kebijakan pendidikan yang bersifat strategis yang tidak berintegrasi dengan politik. Misalnya tujuan, arah, nilai-nilai, dan anggaran pendidikan. Semuanya merupakan kesepakatan politik yang berkaitan terhadap pendidikan nasional. Jadi usaha kanalisasi proses rasional dan politik, penentuan kebijakan pendidikan kurang menggambarkan keadaan faktual di lapangan. Realitanya, banyak dijumpai proses rasional analisis kebijakan pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses politik. Proses rasional empiris analisis kebijakan pendidikan seringkali dipakai sebagai dasar dalam perjuangan politik, namun sebaliknya, proses politik menjadi salah satu bentuk proses rasional karena proses politik berorientasi kepada kepentingan masyarakat (Aziz et al., 2020).

Pada akhirnya kita bisa mendefenisikan analisis kebijakan pendidikan sebagai ilmu sosial terapan sistematis disusun dengan tujuan mengetahui substansi kebijakan pendidikan, agar diketahui secara jelas dan menyeluruh masalah yang akan diatasi oleh kebijakan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, analisis kebijakan dalam bidang pendidikan menjadi aspek yang amat penting dalam era demokrasi dan era revolusi industri 4.0 (Hastuti & Soehartono, 2018). Artinya pemerintah serta pihak-pihak yang mempunyai kewenangan tidak dibiarkan melaksanakan tindakan yang mempengaruhi masyarakat tanpa dikaji substansi, alasan dan akibatnya terhadap masyarakat, selain itu penting juga bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki, atau mempertahankan kebijakan demi kemaslahatan masyarakat banyak atau kepentingan stakeholders pendidikan.

Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan

Realitanya di dalam penyelenggaraan pendidikan sangat terpengaruh oleh kebijakan pemerintah atau pihak lain yang memiliki andil di lembaga pendidikan tertentu, contohnya di lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Maka dari itu analisis kebijakan memiliki fungsi untuk mempelajari serta mengolah kebijakan pemerintah atau bahkan pihak terkait yang ada relevansinya sebagai pengelola kebijakan pendidikan, sehingga bisa di amati dan di telaah kebijakannya dengan akurat, urgensinya menurut Thomas Dye antara lain: 1) Kita dapat menggambarkan kebijakan pendidikan serta dapat mempelajari apa yang di lakukan dan tidak dilakukan pemerintah dalam hal kesejahteraan, pertahanan, pendidikan, hak sipil, kesehatan, energi, perpajakan dan sebagainya; 2) kita bisa bertanya tentang penyebab, atau penentu kebijakan pendidikan; 3) kita bisa bertanya tentang konsekuensi, atau dampak dari kebijakan pendidikan (Alfirzan et al., 2021).

Analisis kebijakan pendidikan ini memiliki peran penting karena untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan ini memiliki pengaruh yang besar untuk kehidupan manusia baik di lihat dari aspek individual ataupun sosial. Maka dari itu usaha pemerintah dalam membangun pendidikan perlu dicermati serta dikawal oleh public, karena dampaknya pendidikan ketika sudah memutuskan kebijakan maka dampak dari kebijakan itu akan luas bagi kehidupan manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu perlu analisis kebijakan pendidikan perlu ada prinsip yang objektif sehingga dari analisis kebijakan pendidikan yang di hasilkan tidak semata-mata menyalahkan kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah yang sedang berkuasa saja, atau bahkan pihak lain yang berkuasa. Analisis kebijakan pendidikan ini harus bisa memberikan gambaran secara gamblang sehingga bisa mengidentifikasi masalah yang ada dikebijakan pendidikan. Untuk terwujudnya hal itu perlunya pendekatan ilmiah objektif serta akurat. Dalam konteks ini analisis kebijakan pendidikan menjadi kunci

dalam memahami dan memperbaiki kebijakan yang tidak sesuai dengan hasil yang sudah direncanakan.

Didalam kehidupan masyarakat analisis kebijakan pendidikan ini sangat penting. Karena dengan analisis kebijakan pendidikan ini bisa menjadi alat ukur dalam menentukan kebijakan yang tepat atau tindakan yang terdapat khususnya dalam aspek pendidikan. Menurut pemaparan Duncan MacRae Policy analysis is the use of reason and evidence to make the best policy choice, artinya untuk melakukan analisis kebijakan ini perlu berhati-hati dalam melakukan pengamatan situasi masalah yang itu adalah suatu objek kebijakan sehingga bisa menghindari dalam hal kesalahan pilihan untuk alternative kebijakan yang keliru (Disas, 2017).

Selanjutnya dari (Badjuri dan Yuwono, 200) memaparkan argumennya tentang kepentingan tentang analisis kebijakan pendidikan : 1) menjadi pertimbangan yang dapat di pandang secara langsung mengenai kebijakan serta memiliki nilai rasional dan objektif untuk melihat semua kebijakan, 2) dari kebijakan itu didesain secara matang guna memiliki tujuan memajukan pendidikan sehingga dapat mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegaran di Indonesia khususnya, 3) karena persoalan tentang pendidikan memiliki banyak cabang yang saling terintegrasi dari satu dengan lainnya, 4) memiliki kemungkinan akan tersedianya pedoman atau panduan yang komperhensif dalam cakupan evaluasi maupun pelaksanaan pada bidang pendidikan. Dikarenakan analisis kebijakan pendidikan memiliki dua cabang yang bersifat substansial yang memiliki arti yang saat ini terjadi, serta Strategik yang memiliki arti yang akan terjadi di masa mendatang. 5) memberikan kesempatan untuk orangtua, siswa dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawal kebijakan pendidikan yang ada (Widodo, 2010).

Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan

Faktor penentu pengembangan, perubahan, atau restrukturisasi organisasi pendidikan yaitu terlaksananya kebijakan pada organisasi pendidikan dengan baik, seperti keputusan-keputusan yang memuat prinsip, tujuan dan aturan yang mampu mendorong sumber daya organisasi pendidikan dengan efektif dan maksimal. Pembuatan kebijakan di bidang pendidikan haruslah memperhatikan faktor lingkungan eksternal, masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), dan umpan balik (*feedback*) dari kebijakan pendidikan itu sendiri (Solichin, 2015). Analisis kebijakan pendidikan dilaksanakan sebagai pedoman dalam bertindak, membimbing kegiatan pendidikan, organisasi sekolah atau lembaga pendidikan sebagai pelaksana sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pedoman dalam bertindak bagi pengambil keputusan analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berfungsi: 1) menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan, 2) mencapai ketertiban layanan pendidikan, 3) aktor pendidikan mampu melaksanakan pendidikan, 4) program kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif, 5) tertib administrasi dapat diwujudkan. Sedangkan fungsi lainnya dari analisis kebijakan pendidikan, antara lain; 1) fungsi inkuiri, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan integral dengan isu strategis lainnya, misalnya analisis metodologis dan substansi, evaluasi dan meta analisis kebijakan dan argumentasi kebijakan, 2) fungsi alokasi guna pengembangan dan kajian tingkatan makro, 3) fungsi komunikasi bagi pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana dan pengelola, peneliti, pelaksana dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan (Fakuroji, 2017).

Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan

Adapun ahli lainnya yang mengidentifikasi karakteristik analisis kebijakan pendidikan secara khusus, yaitu sebagai berikut:

a. Mempunyai tujuan pendidikan, dimana analisis kebijakan pendidikan harus mempunyai arah yang jelas, tujuan yang memberikan manfaat pada penyelesaian masalah pendidikan yang mendasar.

b. Memenuhi aspek sah-formal, analisis kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan pra-syarat yang pasti harus memenuhi agar kebijakan pendidikan mampu dipertimbangkan serta secara sah berlaku pada suatu daerah tertentu. Maka, kebijakan pendidikan wajib memenuhi syarat secara konstitusional (sah formal) sinkron jenjang tingkatan konstitusi yang berlaku pada sebuah daerah sampai dia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di seluruh daerah tersebut.

c. Memiliki konsep operasional, analisis kebijakan pendidikan merupakan instruktur bersifat awam, untuk itu harus mempunyai nilai manfaat bagi operasional sekaligus bisa diaplikasikan. Buat itu kebijakan pendidikan ialah sebuah kewajiban untuk memperjelas skema pencapaian arah pendidikan yang diperlukan stakeholder. Apalagi terjadinya fungsi dukungan dalam pengambilan keputusan tersebut termasuk keperluan akan analisis kebijakan pendidikan.

d. Disusun oleh pihak yang berwenang kebijakan pendidikan semestinya memiliki kewenangan untuk memaksa pihak terkait, untuk menghindari resikonya tidak sampai menimbulkan pengaruh hancurnya pendidikan dan lingkungannya. Para pengelola (administrator) pendidikan, politisi serta analis kebijakan yang terkait eksklusif menggunakan kebijakan pendidikan artinya unsur pokok pembuat kebijakan pendidikan.

e. Bisa dinilai, analisis kebijakan pendidikan hakikatnya tidak lepas dari banyak sekali kondisi yang sesungguhnya perlu ditindaklanjuti. Jika memiliki kebaikan, maka perlu dipertahankan bahkan dikembangkan, kebalikannya bila mengandung kelemahan, maka harus mampu memperbaiki. Analisis kebijakan pendidikan mempunyai karakter yang memungkinkan bisa diberlakukan penilaian secara sederhana, efektif, dan praktis.

f. Mempunyai sistematika, analisis kebijakan pendidikan menjadi sebuah skema, oleh sebab itu hendaklah memiliki sistematika yang menonjol, representatif menyangkut segenap aspek yang ingin dikelola olehnya. Sistematika itu pun dituntut mempunyai prinsip efektif, efisien dan sustainability yang tinggi supaya analisis kebijakan pendidikan jauh berasal sifat diskriminatif, pragmatis, dan struktur yang ada masih repas akibat berbagai macam faktor yang saling berbenturan satu dan lainnya (Yanti, 2020). Hal ini perlu diperhatikan dengan teliti dan hati-hati supaya pemberlakuannya tidak mengakibatkan kecacatan aturan baik internal juga eksternal. Kemudian, dari dalam pun analisis kebijakan pendidikan sepatutnya berpadu dengan kebijakan lain. Contohnya kebijakan penganggaran, kebijakan politik. Sekaligus kebijakan pendidikan pada pusat, daerah dan lembaga pendidikan masing-masing.

Metodelogi Analisis Kebijakan Pendidikan

Menurut metodologis, analisis kebijakan dapat di bedakan menjadi dua metodologi kuantitatif dan metode kualitatif. Akan tetapi sebagian besar pendekatan analisis kebijakan memiliki sifat kualitatif. Analisis kebijakan merupakan proses pemahaman pada suatu masalah kebijakan, sehingga dalam suatu proses yang dilakukan untuk memahami sebuah masalah kebijakan bisa saja melahirkan suatu ide gagasan atau juga sebuah pemikiran mengenai bagaimana cara memecahkan masalah tersebut (Masruri, 2019). Hal itu harus benar-benar dilakukan dengan proses pemahaman yang mendalam. Maka dari itu secara keseluruhan, analisis kebijakan bersifat kualitatif.

Metodologi kualitatif dalam sebuah analisis kebijakan merupakan metodologi yang lebih tertarik atau lebih terfokus untuk melakukan pemahaman secara mendalam pada suatu masalah yang dihadapi dan tidak melihat suatu permasalahan kebijakan sebagai kepentingan generalisasi. Metodologi kualitatif ini lebih suka teknik analisis mendalam (in dept analysis) yang artinya mengkaji permasalahan dalam kebijakan secara kasus per kasus atau

bisa dikatakan mengkaji permasalahan secara detail. Metodologi kualitatif memiliki keyakinan bahwa sifat antara satu masalah dengan masalah yang pasti berbeda. Dengan demikian, maka bisa dipastikan yang akan dihasilkan dari metodologi kualitatif ini bukanlah suatu generalisasi, tapi menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan dalam kebijakan (Masruri, 2019).

Metodologi kuantitatif dalam sebuah analisis kebijakan merupakan metodologi yang pada dasarnya merupakan bentuk operasionalnya paradigma empirisme atau sering disebut juga dengan “kuantitatif-empiris”. Metodologi kuantitatif ini pada dasarnya tertarik dengan pengukuran secara obyektif terhadap suatu permasalahan sosial. Proses pengukurannya dilakukan dengan cara menjabarkan terlebih dahulu setiap masalah sosial ke dalam beberapa komponen masalah, indikator, dan variabel-variabelnya (Asri et al., 2020). Berbeda dengan metodologi kualitatif yang mengkaji lebih mendalam terhadap suatu permasalahan, metodologi kuantitatif lebih ke arah menghasilkan suatu generalisasi. Generalisasi merupakan pernyataan yang benar dan yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu permasalahan dalam kebijakan yang diperkirakan akan berlaku pada suatu parameter populasi tertentu. Metodologi kuantitatif meyakini bahwa dengan generalisasi yang dihasilkan, para peneliti atau analisis kebijakan mempunyai tuntutan untuk dapat menghasilkan alternatif kebijakan yang bisa dan mampu diterapkan secara menyeluruh dan rata dalam lingkup yang lebih luas dan besar.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur yang menghasilkan informasi kependidikan, menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka

memecahkan masalah kependidikan. Analisis kebijakan ini menjadi hal penting karena berperan dalam menentukan arah serta memberikan petunjuk kepada penyelenggara pendidikan di negara. analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berfungsi: 1) mencapai ketertiban layanan pendidikan, 2) menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan, 3) program kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif, 4) aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan, 5) tertib administrasi bisa diwujudkan. karakteristik analisis kebijakan pendidikan anatar lain mempunyai tujuan pendidikan, memenuhi aspek sah-formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, bisa dinilai dan mempunyai sistematika.

Dalam analisis kebijakan pendidikan terdapat dua metodologi yaitu 1) Metodologi kualitatif. Merupakan metodologi yang lebih tertarik atau lebih terfokus untuk melakukan pemahaman secara mendalam pada suatu masalah yang dihadapi dan tidak melihat suatu permasalahan kebijakan sebagai kepentingan generalisasi. 2) Metodologi kuantitatif, merupakan metodologi yang pada dasarnya merupakan bentuk operasionalnya paradigma empirisme atau sering disebut juga dengan “kuantitatif-empiris”. Metodologi kuantitatif ini pada dasarnya tertarik dengan pengukuran secara obyektif terhadap suatu permasalahan sosial. Proses pengukurannya dilakukan dengan cara menjabarkan terlebih dahulu setiap masalah sosial ke dalam beberapa komponen masalah, indikator, dan variabel-variabelnya. Berbeda dengan metodologi kualitatif yang mengkaji lebih mendalam terhadap suatu permasalahan, metodologi kuantitatif lebih ke arah menghasilkan suatu generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfirzan, A., Nasri, Y., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- [2] Asri, A. Y., Visayanti, V., & Arnilawati, R. A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Kinerja Guru. *MAPPESONA: International Journal of Educational Management*.
- [3] Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyantri, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- [4] Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*.
- [5] Danhas, Y. (2021). *Analisis Pengelolaan Dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=j14kEAAAQBAJ>
- [6] Disas, E. P. (2017). Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. <https://doi.org/10.17509/jpp.v17i2.8251>
- [7] Fakuroji, F. (2017). Implementasi Modul Analisis Kebijakan Pendidikan Berbasis Riset. *Nadwa*. <https://doi.org/10.21580/nw.2017.11.1.1305>
- [8] Gunawan, A. H. (1986). *Kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia*. Bina Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=NLQ2AAAAIAAJ>
- [9] Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Jurisprudence*. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- [10] Masruri, A. (2019). LINIERITAS IJAZAH (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan). *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i2.56>
- [11] Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*.
- [12] Tilaar, H. A. R., & Dwijowijoto, R. N. (2008). *Kebijakan pendidikan: pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Pustaka Pelajar. <https://books.google.co.id/books?id=62QOAQAAMAAJ>
- [13] Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. In *Malang: Bayu Media*.
- [14] Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN